

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MERESPON ISU UNJUK RASA TERKAIT TUNJANGAN DPR

Taufan Setyo Pranggono^{1*}, Chilyatul Auliya², Angella Rosha Pangestu³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

*taufan.setyo@uta45jakarta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merespons aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025, yang dipicu oleh polemik tunjangan DPR dan konflik akibat tewasnya seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan. Peristiwa tersebut memicu kerusuhan yang berdampak pada kerusakan fasilitas publik dan meningkatnya ketegangan sosial. Pemerintah merespons melalui gerakan #JagaJakarta sebagai upaya pemulihan sosial, komunikasi publik, dan stabilisasi kota. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan literatur review, menganalisis data sekunder melalui pemberitaan media dan pernyataan resmi pemerintah. Analisis menggunakan model komunikasi *Goals–Plans–Action* (GPA) untuk menelaah tujuan, perencanaan pesan, dan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam meredam situasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah menetapkan tujuan utama berupa pemulihan kepercayaan publik dan tujuan sekunder berupa menjaga ketenangan masyarakat. Rencana komunikasi disusun melalui penyampaian pesan eksplisit, penegasan otoritas, penyampaian argumen rasional, serta kontrol informasi melalui kanal resmi. Tindakan konkret dilakukan melalui perbaikan fasilitas umum, penanganan korban, koordinasi dengan aparat keamanan, serta mobilisasi masyarakat melalui gerakan kolaboratif. Strategi komunikasi tersebut menunjukkan efektivitas dalam menekan kepanikan dan membentuk citra pemerintah yang responsif. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi komunikasi berbasis GPA dapat menjadi kerangka efektif dalam tata kelola krisis di ranah pemerintahan.

Kata kunci: Strategi komunikasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tunjangan DPR 2025

Abstract

This study discusses the communication strategy of the DKI Jakarta Provincial Government in responding to demonstrations at the end of August 2025, which were triggered by the polemic over DPR allowances and the conflict resulting from the death of an online motorcycle taxi driver, Affan Kurniawan. These events sparked riots that resulted in damage to public facilities and increased social tension. The government responded through the #JagaJakarta movement as an effort to restore social order, public communication, and city stability. The study used a descriptive qualitative method with a literature review approach, analysing secondary data through media reports and official government statements. The analysis used the *Goals–Plans–Action* (GPA) communication model to examine the government's objectives, message planning, and actions taken to defuse the situation. The results of the study show that the government set the main objective of restoring public trust and the secondary objective of maintaining public calm. The communication plan was formulated through the delivery of explicit messages, affirmation of authority, presentation of rational arguments, and control of information through official channels. Concrete actions were taken through the repair of public facilities, handling of victims, coordination with security forces, and mobilisation of the community through collaborative movements. This communication strategy proved effective in reducing panic and shaping the image of a responsive government. This study confirms that GPA-based communication strategies can be an effective framework for crisis management in the government sector.

Keywords: *Communication strategy, DKI Jakarta Provincial Government, DPR allowance 2025*

A. Pendahuluan

Pada 25 Agustus hingga awal September 2025, unjuk rasa disertai kerusuhan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di wilayah Jakarta. Unjuk rasa ini awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya tunjangan baru bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yakni berupa tunjangan perumahan. Protes tersebut juga dipicu oleh pernyataan kontroversial dari anggota DPR sebagai tanggapan atas ketidakpuasan yang semakin meningkat di kalangan masyarakat umum, yang dianggap tidak peka, seperti pernyataan Nafa Urbach yang mendukung kenaikan tunjangan dengan alasan bahwa anggota DPR mengalami kesulitan perjalanan menuju tempat kerja. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut masyarakat umum yang menuntut pembubaran parlemen sebagai "orang terbodoh di dunia," Anggota parlemen lain dari Partai Amanat Nasional, Eko Patrio mengunggah video parodi nirempati, yang dipandang sebagai ejekan terhadap kekhawatiran publik. Selain itu juga didorong oleh adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan yang terjadi di beberapa wilayah.

Unjuk rasa kemudian meluas menjadi bentrokan yang lebih besar setelah seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, ditabrak dan terlindas oleh kendaraan lapis baja polisi di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam keadaan sengit di malam mencekam itulah, Affan yang disebut sedang mengantar pesanan justru menjadi korban. Affan sama sekali tidak ada kaitannya dengan ketegangan pada malam itu. Affan hanya berniat menjalankan tugasnya, meski sadar kondisi mengancam nyawanya sendiri yang berada ditengah kekacauan pada malam itu. Mobil rantis brimob yang hendak membubarkan massa melaju dengan sangat kencang, tubuh affan ditabrak dan dilindas. Kendaraan rantis sempat berhenti ketika ban depan mengenai tubuh affan. Namun, dalam kejadian itu tidak ada pertolongan yang dilakukan, mobil tersebut justru terus melaju terus hingga melindas badan affan dan menjauh dari tempat Lokasi kejadian.

Kematian Affan memicu gelombang protes masyarakat, terutama dari sesama pengemudi ojek daring dan mahasiswa. Massa yang tadinya berunjuk rasa di depan Gedung DPR beralih ke markas komando Brimop di kwitang untuk menuntut keadilan bagi Affan kurniawan, mereka membentangkan spanduk bertuliskan "polisi pembunuh" diatas jembatan layang Pasar Senen. Tidak berhenti sampai di situ, insiden ini juga memicu gelombang reaksi keras dari masyarakat dijagat maya. Tagar #RantisBrimop dan #SaveOjol mendadak memasuki jajaran trending topik di media sosial hanya dalam hitungan jam. Banyak warga net menuntut penjelasan dan pertanggung jawaban dari aparat kepolisian. Namun saat itu pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi mengenai kejadian yang menyedot perhatian publik tersebut.

Gelombang massa yang tidak terkendali menyebabkan sejumlah infrastruktur penting terbakar, rusak dan tidak dapat difungsikan sementara waktu. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah sistem transportasi publik, terutama transjakarta yang terpaksa menghentikan seluruh operasional untuk alasan keselamatan. Sejumlah halte transjakarta

dikawasan strategis seperti Senen, Harmoni, dan sekitar markas korps brimob terbakar hebat setelah massa melakukan tindakan vandalisme dan pembakaran fasilitas. Sebelum melakukan pembakaran, massa terlebih dahulu memecahkan kaca halte, menghancurkan tembok halte, menjarah barang-barang, bahkan produk produk yang di jual di minimarket halte tersebut ludes di ambil. Situasi ini semakin tidak kondusif dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat akibat maraknya aksi para demonstiran.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kedamaian dan ketertiban Jakarta, melalui gerakan #JagaJakarta. Ajakan ini muncul sebagai respons atas gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 di depan Gedung MPR/DPR RI, terkait penolakan terhadap rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Gerakan #JagaJakarta juga merupakan sebuah seruan terbuka kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan bertanggung jawab, tanpa kekerasan maupun kerusakan. Gerakan ini dilakukan melalui, Seruan melalui kanal-kanal informasi resmi Pemprov DKI Jakarta, Aksi nyata di lapangan berupa kerja bakti dan pembersihan fasilitas umum yang rusak, Kolaborasi antara unsur pemerintahan, relawan, dan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk menjaga Jakarta tetap aman, tertib, dan kondusif melalui stabilitas sosial, memulihkan fasilitas umum, serta memastikan layanan publik berjalan dengan baik.

Respons positif dari publik terhadap tindakan cepat dalam membangun kembali halte yang terbakar, dan komunikatif ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang baik mampu membangun citra positif pemerintah daerah sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat. Strategi komunikasi publik adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan pemerintah di ruang publik untuk menyatukan pemahaman serta untuk mencapai kesepahaman makna bersama, dengan bertujuan untuk menang gulangi penyebaran infodemik secara masif yang tersebar. (Aurelia & Jumiaty, 2023). Menurut Effendy dalam (Aurelia & Jumiaty, 2023) menjelaskan Strategi dalam komunikasi berarti perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen (management planning) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Anwar Arifin (1984:10) dalam bukunya "Strategi Komunikasi" menyatakan bahwa strategi adalah suatu ketentuan yang bersifat kondisional terkait langkah yang akan diimplementasikan. Oleh karena itu, penerapan strategi komunikasi perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat demi tercapainya tujuan komunikasi. Berikut langkah-langkah untuk menyusun strategi komunikasi menurut Anwar Arifin, Mengenal Khalayak, Menyusun Pesan, Menetapkan Metode, dan Pemilihan Penggunaan Media. (Yaasino & Imran, 2022).

Dalam memahami bagaimana pemerintah merespon dan mengelola isu publik, dibutuhkan pendekatan komunikasi yang sistematis dan terarah. Komunikasi pemerintah tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan kepercayaan, mengelola persepsi publik, dan menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model strategi komunikasi *Goals-Plans-Action (GPA)* yang dikemukakan oleh James Prince Diliard, seorang profesor dari Amerika Serikat, sebagai landasan teoritis. (Salim & Putra, 2022). Model ini menekankan bahwa setiap tindakan komunikasi berangkat dari tujuan yang jelas (goals), disusun melalui perencanaan yang matang (plans), dan diwujudkan dalam bentuk tindakan yang konkret (action). Penelitian ini mengkaji bagaimana strategi komunikasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui gerakan #JagaJakarta dalam membangun partisipasi publik dan menjaga stabilitas sosial pasca aksi unjuk rasa dan konflik sosial.

B. Kajian Pustaka

1. Komunikasi Pemerintah

Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia (human communication) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Karena itu komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi dan ia juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal (Silalahi, 2004). Komunikasi pemerintahan merupakan sebuah sikap antara pegawai pemerintah dalam menyebarkan sebuah informasi, ide maupun sebuah gagasan untuk internal organisasi maupun eksternal organisasi ataupun sebaliknya (Buluamang dan Handika, 2018). Komunikasi pemerintah bukan semata-mata sebagai sebuah media untuk pemerintah dalam memberikan sebuah informasi terkait suatu aturan khalayak, namun juga sebagai alat untuk menyinkronkan sebuah aktivitas secara sistematis dalam melahirkan sebuah kerjasama. Selain itu, informasi yang disampaikan oleh pemerintah akan memberikan feedback dengan bentuk adanya persepsi dari khalayak yang dapat menimbulkan stigma positif maupun negatif (Pratiwi, 2021). Komunikasi pemerintah disebut sebagai suatu proses penyebaran informasi diantara aparatur negara baik internal maupun eksternal jika informasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat disampaikan dengan baik tentu informasi itu sukses dan dapat diterima oleh masyarakat. (Razak & Nugraha, 2022).

2. Strategi Komunikasi

Tarone (1981) mendefinisikan strategi komunikasi sebagai upaya sistematis oleh pembelajar untuk mengekspresikan maksud dalam bahasa target (bahasa yang dipelajari) ketika ia tidak dapat membentuk atau memilih kaidah bahasa target dengan tepat. Ellis (1994) mengungkapkan gagasan serupa bahwa strategi komunikasi adalah keterampilan prosedural yang digunakan pembelajar untuk mengatasi kekurangan kosa kata mereka. Hal ini dipertegas Cohen (2004) bahwa strategi komunikasi adalah upaya sistematis oleh pembelajar untuk mengekspresikan makna dengan bahasa target di mana aturan bahasa target yang sistematis belum terbentuk (Vardhani & Tyas, 2018). Strategi komunikasi dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai dan jenis materiil apa saja yang dipandang mampu memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan tersebut. Tujuan strategi komunikasi menjadi penting karena meliputi *annaouncing, motivating, educating, informing, and supporting decision making*. (Sari & Soegiarto, 2021).

a. Model Goals-Plan-Action Theory

Dalam proses komunikasi, seseorang memiliki tujuan sebelumnya, kemudian merencanakan untuk mencapai tujuan tersebut baru kemudian ada aksinya. (Saptiyono, Sjafrudin, & Steyowati , 2024) Adaptasi konsep ini mendefinisikan bahwa seorang komunikator harus mengolah informasi penting bagi dirinya dan membuat strategi atau perencanaan untuk mewujudkan tujuan dari komunikasinya.

Komunikator yang telah menentukan tujuan (Goal) yang ingin dicapainya akan membuat perencanaan (Plans) dan melaksanakan rencananya tersebut (Action) (Algiwity, Majid , & Muttaqin , 2025). Teori GPA dikembangkan untuk menjelaskan proses dimana orang menghasilkan pesan yang ditujukan untuk mengubah atau mempertahankan sikap dan perilaku. Teori GPA memiliki perspektif dalam produksi pesan memiliki tiga proses langkah. Pertama, melibatkan goal (tujuan), plan (rencana), dan terakhir adalah action (tindakan).

- Goals (Tujuan)

Merupakan keadaan di masa depan yang direncanakan individu untuk mencapai atau memelihara sesuatu. Goal atau tujuan adalah apa yang orang coba untuk lakukan. Diliard membagi Goal menjadi dua bagian yaitu primary dan secondary goal. Primary goal adalah hal yang pertama kali ingin untuk dilakukan. Artinya tujuan ini untuk memulai proses produksi pesan. Tanpa tujuan utama, tidak akan ada kebutuhan rencana atau tindakan yang sesuai. Setelahnya adalah secondary goal merupakan tujuan yang mengikuti dari tujuan utama. Dalam Teori GPA, ada tiga kemungkinan hubungan antara tujuan utama dengan sekunder. Pertama, adalah hubungan antara tujuan utama dan sekunder tidak sejalan. Artinya adalah tujuan dapat saling berlawanan. Kedua, tujuan sekunder mungkin dapat tidak relevan dengan tujuan utama. Terakhir, kedua tujuan saling berkaitan. Hal ini berarti tujuan utama dan sekunder memiliki hubungan yang erat dan sejalan satu sama lain.

- Plans (Rencana)

Plan atau rencana adalah pedoman mental untuk menghasilkan perilaku verbal maupun nonverbal. Dalam teori ini, rencana memiliki empat dimensi yaitu eksplisit, dominasi, argumen, dan kontrol. Eksplisit merupakan sejauh mana komunikator menunjukkan tujuan dalam pesannya. Dominasi mengacu pada kekuatan yang coba untuk ditunjukkan oleh komunikator mencoba untuk mengatur komunikasi. Argumen mengacu pada alasan-alasan yang coba dihadirkan komunikator dalam mempengaruhi targetnya. Dimensi yang terakhir adalah kontrol, merupakan kekuatan untuk mengatur timbal balik.

- **Action (Tindakan)**

Action atau tindakan merujuk pada bagaimana persuader mengaplikasikan rencana-rencana yang ada agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan dipengaruhi oleh tujuan secara langsung maupun tidak langsung melalui perencanaan. (Salim & Putra, 2022) Model GPA juga menyoroti pentingnya rencana strategis (garis besar tindakan untuk mencapai tujuan) dan rencana taktis (langkah - langkah spesifik untuk melaksanakan rencana strategis). Meskipun awalnya dikembangkan untuk komunikasi interpersonal, model ini juga dapat diterapkan dalam konteks komunikasi lainnya, seperti komunikasi organisasi dan persuasi publik. (Prasetyaningrum & Mardiana, 2025).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan literatur review. Literature review merupakan kegiatan yang fokus terhadap sebuah topik spesifik yang menjadi minat untuk dianalisis secara kritis terhadap isi naskah yang dipelajari (Wahyuni, 2022). Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana strategi komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merespons isu publik pasca kerusuhan unjuk rasa Agustus 2025. Pendekatan literatur review menganalisis berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan peristiwa dan kebijakan komunikasi pemerintah.

Sumber data utama penelitian ini adalah pernyataan resmi pejabat publik terkait krisis (pidato, konferensi pers, unggahan media sosial), yang dikumpulkan dari portal berita nasional, akun resmi pemerintah, serta rekaman siaran televisi. Data sekunder berupa pemberitaan media arus utama dan respon publik di media sosial (komentar, unggahan, hashtag) digunakan untuk memetakan dampak gaya komunikasi pejabat terhadap persepsi masyarakat. Data-data tersebut digunakan untuk menelusuri bagaimana komunikasi pemerintah dijalankan dalam tiga tahap menurut model Goals–Plans–Action (GPA), yaitu perumusan tujuan komunikasi (*goals*), perencanaan pesan (*plans*), dan tindakan komunikasi (*action*).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, analisis wacana, dan interpretasi hasil. Pada tahap reduksi data, peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan data dari artikel berita, media sosial, dan pernyataan resmi Pemprov DKI Jakarta berdasarkan komponen teori *Goals–Plans–Action (GPA)*: *goals*, *plans*, dan *action*. Tahap analisis wacana digunakan untuk menelaah bagaimana pesan publik dibentuk dan disampaikan pemerintah dalam merespons isu unjuk rasa, termasuk melalui gerakan #JagaJakarta. Tahap interpretasi dilakukan dengan menghubungkan hasil temuan dengan teori GPA guna memahami strategi komunikasi pemerintah dalam membangun kepercayaan dan meredam ketegangan publik pasca kerusuhan. Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan prosedur triangulasi sumber dan triangulasi metode. (Rafsanjani, Akbar, & Allifiansyah, 2025). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti pemberitaan media daring, siaran langsung konferensi pers Gubernur DKI Jakarta, unggahan media sosial resmi Pemprov DKI Jakarta, serta tanggapan publik di platform digital. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan memadukan analisis isi

kualitatif dan studi literatur akademik yang relevan mengenai strategi komunikasi pemerintah dan teori *Goals-Plans-Action* (GPA). Penderkatan triangulatif ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data asert amemperkuat interpretasi peneliti terhadap dstrategi komunikasi pemerintah dalam mengelola isu.

D. Hasil Dan Pembahasan

Pada akhir bulan Agustus 2025, Jakarta menghadapi serangkaian demonstrasi yang dipicu oleh ketidakpuasan publik terkait rencana peningkatan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Aksi protes yang awalnya berlangsung di depan Gedung DPR RI berakhir menjadi kerusuhan, mengakibatkan beberapa fasilitas umum, seperti halte Transjakarta di Senen dan Harmoni, mengalami kerusakan. Situasi yang mencekam ini menuntut pemerintah untuk segera menenangkan publik dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas kota. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi publik memegang peran penting. Coombs (2012) menjelaskan bahwa "*crisis communication is the process of collecting, processing, and disseminating information required to address a crisis situation*", artinya komunikasi krisis menjadi sarana utama pemerintah dalam mengendalikan persepsi publik. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang tepat diperlukan agar pesan pemerintah tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki peran penting sebagai komunikator publik dalam menjaga stabilitas sosial dan membangun kepercayaan masyarakat di tengah terjadinya kerusuhan unjuk rasa pada akhir Agustus 2025. Adapun menurut peneliti, strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam merespon isu unjuk rasa tunjangan DPR 2025 memiliki kesesuaian dengan model strategi komunikasi *Goals-Plan-Action* yang dikembangkan oleh James Dilliard. Teori GPA merupakan teori yang menyatakan bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang memiliki tujuan. Setiap inidivu tahu tentang apa yang mereka lakukan. Dalam Teori GPA terdapat tiga langkah proses menghasilkan pesan yaitu goals, plans, dan action (Saptiyono, Sjafie, & Steyowati , 2024).

a. Goals (Tujuan)

Goals atau tujuan merujuk pada keadaan di masa depan yang direncanakan atau diharapkan. Dalam Teori GPA tujuan dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan utama dan sekunder.

1) Tujuan Utama

Tujuan utama merupakan hal yang pertama kali ingin di lakukan. Berdasarkan hasil temuan data, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam pertanyaannya menegaskan bahwa langkah awal yang di lakukan pemerintah daerah setelah kerusuhan adalah mengmbalikan kepercayaan publik terhadap kondisi Jakarta. Ia mengatakan "Saya bertanggung jawab yang di jakarta, yang untuk di jakarta kenapa akhirnya kemudian saya berkoordinasi pagi hari setelah kejadian dengan pangdam dan kapolda, karena beliau

berdua sama dengan saya pasti mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengembalikan kepercayaan publik tentang kota Jakarta ini.” (Kompas, 30 Agustus 2025). Selain itu ia juga menegaskan, "Ini tanggung jawab Pemerintah Jakarta, apa pun situasinya... tetap menjadi kewajiban kami untuk memperbaiki dan membersihkan" (Detiknews, 2025). Pernyataan ini menunjukkan fokus utama pada pemulihan fisik dan keamanan kota sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya *primary goal* atau tujuan utama dari proses komunikasi pemerintah, yaitu memulihkan kepercayaan publik. Dilliard menjelaskan bahwa, *primary goal* (Tujuan Utama) menjadi pemicu utama munculnya crises komunikasi. Tanpa tujuan tersebut, tidak akan ada kebutuhan untuk menyusun rencana komunikasi maupun tindakan komunikasi lanjutan.

2) Tujuan Sekunder

Tujuan yang mengikuti dari tujuan utama. Tujuan sekunder dari strategi komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merespon isu unjuk rasa tunjangan DPR 2025 adalah menumbuhkan rasa aman dan mengurangi kepanikan di tengah masyarakat. Selain berupaya memulihkan kepercayaan publik sebagai tujuan utamanya, pemerintah juga berusaha menjaga agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang simpang siur. Hal ini terlihat dari langkah Gubernur Pramono Anung yang segera menggelar konferensi pers pada 30 Agustus 2025 untuk menjelaskan situasi terkini pasca unjuk rasa.

b. Plans (Rencana)

Dalam teori *Goals-Plans-Action* (GPA), setelah tujuan komunikasi ditetapkan, tahap berikutnya adalah *Plans* atau perencanaan. Rencana merujuk pada pedoman mental untuk menghasilkan tindakan perilaku verbal dan nonverbal. (Saptiyono, Sjafie, & Steyowati , 2024). Tahapan ini menjelaskan bagaimana komunikator, menyusun langkah strategis sebelum pesan publik di sampaikan, maka dalam konteks penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Plans merupakan langkah - langkah sistematis yang dirancang untuk menjembatani antara tujuan dan tindakan komunikasi. (Prasetyaningrum & Mardiana, 2025). Menurut Dillard, rencana komunikasi (Plans) memiliki empat dimensi penting, yaitu eksplisit, dominasi, argumen, dan kontrol. (Saptiyono, Sjafie, & Steyowati , 2024). Perencanaan yang baik sangat penting agar pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat himbauan umum, tetapi juga dapat mengatasi disinformasi dan narasi negatif yang beredar di media sosial. Dalam konteks ini, pemerintah merencanakan penggunaan berbagai media resmi seperti konferensi pers, siaran langsung, dan media sosial resmi dengan pendekatan yang eksplisit dan berorientasi pada kontrol informasi guna memastikan pesan sampai dengan jelas dan menghindari kesalahpahaman. Terdapat empat dimensi rencana dalam Teori GPA, yaitu :

1) Eksplisit

Merujuk pada sejauh mana komunikator mengungkapkan tujuannya kepada komunikan. Dimensi eksplisit dalam tahap *Plans* tercermin dari bagaimana Pemprov DKI Jakarta menyampaikan pesan komunikasinya secara terbuka dan langsung kepada masyarakat. Ketika situasi publik diwarnai ketegangan dan beredarnya berbagai informasi yang simpang siur, Pemprov DKI Jakarta berupaya menghadirkan komunikasi yang lugas, jelas, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui pertanyaan resmi di Balai Kota yang di kutip dari Merdeka (2025). Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa seluruh moda transportasi publik, termasuk Transjakarta dan MRT, telah kembali normal. Pernyataan ini menunjukkan bentuk komunikasi yang eksplisit karena disampaikan secara transparan untuk menenangkan publik dan memastikan bahwa situasi kota berada dalam kendali.

Langkah eksplisit lainnya tampak dari pengumuman Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, yang disampaikan kepada media Banpos (29 Agustus 2025). Dalam pernyataannya, Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa seluruh biaya pengobatan luka akibat bentrokan akan di tanggung penuh melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya untuk segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat kerusakan. Dalam laporan Suara Merdeka (2025) disebutkan bahwa beberapa titik di kawasan Senen menjadi prioritas utama perbaikan, dan Pemprov berjanji untuk segera meresmikan hasil perbaikan tersebut pada hari berikutnya.

Beberapa hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak hanya sekedar mengimbau, tetapi juga memberikan jaminan konkret kepada warga yang terdampak. Penyampaian pesan yang jelas, transparan, dan langsung kepada masyarakat seperti ini, memperlihatkan bentuk komunikasi eksplisit yang berorientasi pada pemulihan kondisi sosial serta peningkatan kepercayaan publik.

2) Dominasi

Dominasi mengacu pada power atau kekuatan yang ingin ditunjukkan komunikator kepada komunikan (Saptiyono, Sjafie, & Steyowati, 2024). Ini mencakup bagaimana komunikator memperlihatkan kontrol, otoritas, dan pengaruhnya dalam proses komunikasi untuk memastikan pesan di terima dan di ikuti oleh audiens. Dalam temuan peneliti, konteks respon Pemerintah DKI Jakarta terhadap unjuk rasa terkait tunjangan DPR, dominasi ini terlihat jelas melalui berbagai tindakan dan pernyataan resmi yang menunjukkan bahwa pemerintah berusaha mengendalikan situasi.

Dalam kumpulan data yang di analisis, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menunjukkan dominasi melalui pengambilan keputusan yang cepat dan konkret, seperti

instruksi langsung untuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak pasca demo, "Saya adalah orang yang lebih ingin bekerja untuk menyelesaikan masalah... Saya terus terang betul-betul berkeinginan untuk menyelesaikan masalah" (Kompas, 2025). Dalam konferensi pers pada 30 Agustus 2025, Pramono menyampaikan bahwa dirinya memilih tetap membuka kegiatan *Car Free Day* untuk menunjukkan bahwa Jakarta aman dan terkendali.

Selain itu, tindakan tegas Gubernur dan koordinasi erat dengan aparat dan multi stake holder seperti Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), serta berbagai elemen masyarakat juga merupakan manifestasi dominasi yang memperkuat posisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai otoritas pusat pengambil keputusan yang dapat diandalkan. Aspek Dominasi ini penting agar pesan pemerintah mendapat posisi unggul dan tidak mudah tergeser oleh narasi lain yang berpotensi menimbulkan kekacauan atau ketidakpastian. Sebagaimana teori menegaskan, pengukuhan kekuatan komunikator dalam dominasi menjadi elemen krusial agar tujuan komunikasi dapat tercapai secara efektif.

3) Argumen

Dimensi argumen dalam tahap *Plans* menggambarkan bagaimana Pemprov DKI Jakarta membangun dasar logis untuk meyakinkan publik terhadap langkah langkah yang diambil setelah demonstrasi Agustus 2025. Argumen yang digunakan tidak hanya berupa ajakan moral, tetapi juga disertai alasan rasional agar masyarakat memahami pentingnya menjaga ketertiban dan bersama-sama memulihkan kondisi kota. Melalui pernyataan yang disiarkan di Suara Merdeka (2025), Pemprov menjelaskan bahwa seluruh moda transportasi publik telah kembali beroperasi secara normal. Informasi ini disampaikan untuk menegaskan bahwa Pemprov bekerja cepat mengatasi dampak kerusakan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap gangguan aktivitas harian. Pernyataan semacam ini menjadi bentuk argumen yang menekankan efektivitas tindakan Pemprov dalam memulihkan stabilitas sosial.

Pemprov juga memperkuat argumen komunikasinya dengan menegaskan tanggung jawab terhadap korban demonstrasi. Melalui pemberitaan Banpos (29 Agustus 2025), Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menyampaikan bahwa Pemprov menanggung seluruh biaya pengobatan korban luka. Tindakan ini bukan hanya bentuk empati, tetapi juga menjadi argumen yang memperlihatkan keseriusan Pemprov dalam melindungi warganya. Dapat melihat bahwa pemerintah daerah tidak sekadar menyampaikan himbauan, melainkan benar benar hadir melalui kebijakan nyata. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan pentingnya menjaga ketenangan agar proses perbaikan fasilitas umum dapat berjalan cepat. Dalam laporan Suara Merdeka (2025) disebutkan bahwa beberapa titik kerusakan di kawasan Senen menjadi prioritas utama perbaikan. Pernyataan ini memperkuat argumen bahwa kerja sama masyarakat sangat dibutuhkan agar situasi tetap kondusif dan pemulihan bisa dilakukan secara optimal. Argumen-argumen yang dibangun Pemprov bersifat rasional dan menekankan tanggung jawab pemerintah terhadap pemulihan kota yang tidak hanya menenangkan warga, tetapi

juga menanamkan kepercayaan bahwa langkah yang diambil didasari logika dan kepentingan bersama.

4) Kontrol

Dalam tahap *Plans*, unsur kontrol tampak dari bagaimana Pemprov DKI Jakarta mengelola arus informasi agar pesan yang disampaikan tetap konsisten di tengah situasi pasca demonstrasi Agustus 2025. Saat kondisi publik masih diwarnai keresahan dan banyak beredar kabar yang tidak pasti, Pemprov berusaha memastikan bahwa seluruh informasi yang diterima masyarakat berasal dari sumber resmi. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi komunikasi untuk mencegah munculnya kesalahpahaman dan menjaga stabilitas sosial di ibu kota.

Pemprov DKI Jakarta menjalankan kontrol komunikasi dengan cara mengoordinasikan penyampaian informasi antarinstansi dan kanal resmi. Segala perkembangan mengenai situasi kota, perbaikan fasilitas publik, hingga penanganan korban disampaikan secara terpusat melalui situs dan media sosial resmi Pemprov, seperti akun @DKIJakarta di X (Twitter) dan Instagram. Setiap unggahan menggunakan narasi yang senada: mengajak masyarakat tetap tenang, menjaga kedamaian, dan berkolaborasi memulihkan Jakarta. Konsistensi pesan ini memperlihatkan bahwa Pemprov berupaya mengarahkan opini publik agar tetap positif dan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi. Langkah pengendalian informasi juga terlihat dari respons cepat Pemprov terhadap munculnya hoaks dan narasi negatif di media sosial. Ketika beredar kabar yang dapat memicu kepanikan, Pemprov segera memberikan klarifikasi resmi untuk menegaskan kebenaran situasi di lapangan. Tindakan semacam ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah mengontrol persepsi publik agar tetap sesuai dengan fakta dan tidak menimbulkan ketegangan baru.

Pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang mengatakan “ Untuk Dinas Kominfo saya minta untuk selalu menyampaikan ke publik Jaga Jakarta” (Kompas 30 Agustus 2025), secara jelas kalimat tersebut memperkuat aspek kontrol dalam teori *Goals, Plans, Action* (GPA). Bagian kontrol ini lebih menekan pada kemampuan komunikator untuk mengatur arus komunikasi serta memastikan pesan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selain pengelolaan informasi eksternal, bentuk kontrol juga diterapkan secara internal dengan menjaga keselarasan komunikasi antar pejabat daerah. Setiap pernyataan publik yang disampaikan oleh perwakilan Pemprov menggunakan pesan yang seirama, sehingga tidak terjadi kontradiksi atau kebingungan di masyarakat.

Sebagai bentuk konkret dari upaya kontrol komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berbagai kanal media sosial dimanfaatkan secara aktif untuk memastikan penyebaran informasi tetap terpusat dan konsisten. Aktivitas ini tidak hanya dilakukan melalui akun resmi Pemprov, tetapi juga melibatkan sejumlah tokoh publik dan pejabat daerah sebagai bagian dari strategi penguatan pesan publik. Konten-konten yang diunggah pada periode pasca-unjuk rasa menunjukkan adanya keseragaman narasi dan koordinasi waktu publikasi, yang menandakan bahwa pengendalian arus informasi

dilakukan secara sistematis, bukan spontan. Berikut merupakan rekapitulasi aktivitas media sosial yang merepresentasikan bentuk penerapan kontrol komunikasi tersebut.

Tabel 1. Analisis Kontrol Komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Media Sosial (Periode 25 Agustus–10 September 2025)

No.	Platform	Akun	Jumlah Konten	Rentang Waktu
1.	Tiktok	@pemprovdkijakarta	22	28 Agustus – 8 September 2025
2.	Tiktok	@pramonoanung	4	30 Agustus – 8 September 2025
3.	Tiktok	@ranokarno	2	30 Agustus – 1 September 2025
4.	X	@DKIJakarta	24	28 Agustus – 12 September 2025
5.	Instagram	@dkijakarta	27	28 Agustus – 12 September 2025
6.	Instagram	@pramonoanung	4	30 Agustus – 8 September 2025
7.	Instagram	@ranokarno	4	30 Agustus – 3 September 2025

Sumber: diolah oleh penulis (2025)

Keseragaman narasi ini memperkuat citra pemerintah daerah sebagai lembaga yang solid dan mampu mengelola komunikasi publik secara profesional. Melalui kontrol komunikasi yang terarah dan konsisten, Pemprov DKI Jakarta berhasil mempertahankan kepercayaan masyarakat di tengah situasi pasca demonstrasi. Upaya ini memperlihatkan bahwa pengendalian informasi bukan sekadar menahan arus berita negatif, tetapi juga menjadi cara efektif untuk menegaskan kehadiran pemerintah daerah sebagai pihak yang tanggap, transparan, dan bertanggung jawab terhadap pemulihan sosial di Jakarta.

C. Action (Tindakan)

Tindakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pasca demonstrasi Agustus 2025 menjadi wujud nyata dari pelaksanaan strategi komunikasi yang telah dirancang sebelumnya. Setelah menyusun rencana komunikasi dan menyampaikan pesan publik secara konsisten, Pemprov menindaklanjutinya melalui langkah konkret untuk menenangkan situasi serta memulihkan kondisi sosial dan fisik kota. Salah satu langkah yang segera dilakukan adalah pemulihan fasilitas umum yang rusak akibat kerusuhan. Berdasarkan laporan Suara Merdeka (2025), Pemprov mengerahkan petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, dan PPSU untuk memperbaiki halte, taman kota, serta sarana transportasi publik yang terdampak. Proses perbaikan dilakukan dengan cepat agar aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan normal. Gubernur Jakarta Promono Anung Wibowo mengganti nama Halte Transjakarta Senen Sentral di Pasar Senen, Jakarta Pusat, menjadi Halte Jaga Jakarta. Nama "Jaga Jakarta" dia berikan untuk mengingatkan semua

orang agar perusakan fasilitas umum tidak terulang. "Sebagai bagian upaya kita untuk menjaga Jakarta secara bersama-sama supaya kejadian ini tidak terulang kembali, maka saya bersama jajaran Balai Kota memutuskan untuk mengubah Halte Sentral Jakarta ini menjadi Jaga Jakarta," kata Pramono dalam keterangan tertulis, Senin, 8 September 2025. Tindakan ini menjadi bukti bahwa Pemprov tidak berhenti pada tataran imbauan, melainkan benar-benar merealisasikan tanggung jawabnya di lapangan.

Selain pemulihan infrastruktur, Pemprov DKI Jakarta juga menginisiasi berbagai aksi sosial untuk memperkuat solidaritas warga. Berdasarkan hasil analisis, penggunaan tagar #JagaJakarta bukanlah sesuatu yang muncul secara spontan saat terjadi demonstrasi pada Agustus 2025, melainkan merupakan bagian dari strategi komunikasi yang sudah terbentuk sejak lama. Menurut hasil penelitian Iman Surya et al. (2021) dalam *Jurnal Administrasi Publik*, tagar #JagaJakarta telah digunakan secara intensif oleh Pemprov DKI Jakarta sejak masa pandemi Covid-19 sebagai sarana komunikasi publik untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif menjaga kota dan mematuhi kebijakan pemerintah (Surya, Nurmiyati, Suranto, & Hasanah, 2021). Melalui kampanye #JagaJakarta, Pemprov mengajak masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha untuk bersama-sama membersihkan area publik serta menjaga ketertiban pasca demonstrasi. Kegiatan ini menjadi contoh nyata dari komunikasi digital yang diterjemahkan menjadi aksi kolaboratif, memperlihatkan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas kota. Langkah nyata lainnya terlihat dari pemberian bantuan kepada korban terdampak. Berdasarkan pemberitaan Banpos (29 Agustus 2025), Pemprov memastikan seluruh korban luka mendapat penanganan medis tanpa biaya. Kebijakan ini menunjukkan empati sekaligus komitmen sosial Pemprov dalam melindungi warganya, serta menjadi bentuk implementasi langsung dari pesan kemanusiaan yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis strategi komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merespons isu unjuk rasa 2025, dapat disimpulkan bahwa pemerintah berhasil memanfaatkan pendekatan komunikasi publik yang terstruktur dalam mengelola krisis sosial. Melalui teori Goals–Plans–Action (GPA), strategi pemerintah dapat diidentifikasi sebagai berikut: *Goals*: Pemerintah menetapkan tujuan utama berupa pemulihan kepercayaan publik dan stabilitas sosial, serta tujuan sekunder berupa meredakan kepanikan dan membangun rasa aman di masyarakat. *Plans*: Penyusunan pesan dilakukan secara eksplisit, disertai penegasan otoritas, argumen logis, dan kontrol informasi agar tidak menimbulkan misinformasi. *Action*: Pemerintah melakukan langkah konkret berupa pemulihan fasilitas publik, penjaminan layanan kesehatan bagi korban, konferensi pers, serta penguatan kolaborasi publik melalui kampanye #JagaJakarta. Strategi ini memperlihatkan bahwa penyampaian pesan yang jelas, cepat, dan terkoordinasi mampu meredam eskalasi konflik serta menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat. Selain itu, tindakan nyata di lapangan memperkuat efektivitas komunikasi pemerintah. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal dan aparat keamanan, menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan kondisi kota. Dengan

demikian, pendekatan komunikasi terarah tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga instrumen penting dalam stabilisasi sosial dan manajemen krisis.

E. Daftar Pustaka

- Algiwity, D., Majid, A., & Muttaqin, A. (2025). Strategi Komunikasi Publik Melalui Media Publisitas Universitas Muslim Indonesia Makassar dalam Penyebaran Informasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 16-34.
- Aurelia, D. G., & Jumiati, I. E. (2023). Strategi Komunikasi Publik Dalam Menanggapi Gelombang Misinformasi Dan Disinformasi Ppdb Online Di Provinsi Banten. *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, 117-127.
- Fikriani, D. N., Maryam, S., & Saputra, W. T. (2020). Manajemen Isu Dalam Mempertahankan Citra Pt Pembangunan Jaya Ancol Tbk (Studi Kasus Isu Pantai Publik Ancol). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 35-40.
- Noviana, K. K. (2025). Strategi Komunikasi Publik dalam Implementasi Pelayanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Timur. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*, 48-64.
- Prasetyaningrum, S. I., & Mardiana, L. (2025). Analisis Komunikasi Strategis PT Pertamina Patra Niaga RJBT dalam Mengelola Brand image Melalui Instagram. *MEDIASI Jurnal Kajian dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi*, 197-212.
- Prayudi. (2007). Manajemen Isu dan Tantangan Masa Depan: Pendekatan Public Relations. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 25-39.
- Rafsanjani, S. R., Akbar, M., & Allifiansyah, S. (2025). Representasi Fenomena Fomo : Analisis Fenomenologi Aksi Demonstrasi 25 Agustus 2025 Para Ojol di Tiktok. *JIMU : Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 2047-2054.
- Rahmawati, O. D., Fitria, N., & Mujab, S. (2023). Strategi Manajemen Isu Dan Komunikasi Krisis Mcdonald's Indonesia Yang Terkena Imbas Informasi Hoaks Fatwa Mui Terkait Haramnya Membeli Produk Israel. *Kultura Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 221-226.
- Razak, R., & Nugraha, M. A. (2022). Komunikasi Pemerintahan Dalam Menyebarkan Informasi Publik Pada Diskominfo Kota Bukittinggi Melalui Website. *Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJDPR)*, 33-45.
- Saptiyono, A., Sjafe, S. S., & Steyowati, R. M. (2024). STRATEGI SOSIALISASI LITERASI MEDIA AKUN INSTAGRAM @japelidi. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1-17.

- Salim, M., & Putra, G. A. (2022). Analisis Komunikasi Persuasif Peony Ecohouse Dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Melalui Pendekatan Teori Goals-Plans-Action. *Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna*, 20-21.
- Sari, W. P., & Soegiarto, A. (2021). Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PBB). *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 188-205.
- Silalahi, U. (2004). Komunikasi Pemerintahan: Mengirim Dan Menerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 36-54.
- Surya, I., Nurmiyati, N., Suranto, & Hasanah, N. (2021). Analysis of The Implementation of Smart Governance through Twitter in Local Governments in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik (Journal Publik Administration)*, 169-184.
- Vardhani, N. K., & Tyas, A. S. (2018). Strategi Komunikasi Dalam Interaksi Dengan Mahasiswa Pertukaran Asing. *Jurnal Gama Societa*, 9-16.
- Wahyuni, A. S. (2022). Literature Review: Pendekatan Berdiferensiasi Dalam Pembelajaran IPA. *Jurnal Pendidikan MIPA*, 118-126.
- Yaasino, A. A., & Imran, A. I. (2022). Strategi Komunikasi Unit Corporate Communication Kompas Gramedia Dalam Membangun Hubungan Dengan Stakeholder Melalui Program . *e-Proceeding of Management*, 2663-2672.